

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.S.S Tambunan. *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Bandung: Binacipta.
- Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti. 2014. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bagir Manan. 2012. *Membedah UUD 1945*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Bahir Mukhammad. 2022. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Bambang Sugianto. 2020. *Hukum Tata Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Benny K. Harman. 2013. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi (Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- C.C. Supena. 2022. Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum. *Jurnal Moderat*. Vol.3, No.8.
- David A. Strauss. 2010. *The Living Constitution*. New York: Oxford University Press.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum (Teori dan Metode)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ernawati, Moh Shohib. 2024. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Faisal Akbar Nasution, Andryan. 2023. *Hukum Tata Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Feri Amsari. 2013. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hendra Irawan. 2023. *Hukum Tata Negara*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Ibnu Sina Chandranegara. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ida Budhiati. 2020. *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

- Ida Budhiati. 2020. *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqe. 2011. *Konstitusi Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqe dan M. Ali Syafa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqe. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqe. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jimly Asshiddiqe. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- K.C. Wheare. 2015. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Diterjemahkan oleh Imam Bachaqie. Bandung: Nusa Media.
- M. Adystia Sunggara, M. Imanuddin, Rocky Marbun. 2023. *Penemuan dan Penafsiran Hukum*. Jakarta: Publica Indonesia Anggota IKAPI.
- Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mirza Nasution, Geofani Milthree Saragih. 2024. *Hukum Tata Negara Indonesia (Pengantar Dasar)*. Jakarta: Kencana.
- Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI.
- Moh. Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi dan Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan Syaidi Tarigan. 2025. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Purwokerto: Amerta Media.
- Rohendra Fathammubina. 2020. *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Safi'. 2021. *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Saldi Isra, et.al. 2010. *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif) Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Padang: Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan)*. Gresik: Unigres Press.

- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Topo Santoso, Ida Budhiati. 2018. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Wira Atma Hajri. 2017. *Living Constitution Cara Menghidupkan UUD 1945*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Zainal Arifin Hoesein. 2013. *Judicial Review di Mahkamah Agung, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

JURNAL

- Abdul Wahid Azar, Suriyanto, 2024, "Analisis Kewajiban Legislasi DPR dan Pemerintah dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXII/2023", *Iblam Law Review*, Vol.4, No.3, hlm.5.
- Agustinus Cahya Putra. 2019. "Perbandingan *Coattail Effect* Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia dan Argentina". *Jurnal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya.
- Akhmad Rizal. 2022. "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan". *Proceeding of the 1 Conference on Social, Politics, and Culture*. Vol.1.
- Bimo Fajar Hantoro. 2023. "Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Undang: Jurnal Hukum*. Vol.6, No.1.
- Cecep Cahya Supena. 2022. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum". *Jurnal Moderat*, Vol.8, No.2.
- Fakhris Lutfianto Hapsoro. 2020. "Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan *The Living Constitution*". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol.50. No.4.
- H.A. Lawali Hasibuan. 2023. "Metode Penafsiran Hukum sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki". *Jurnal Legisla*. Vol.15, No.2.
- Juwai Riyah, 2024. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara". *Justice: Journal of Law*. Vol.3, No.2.
- Mazdan Maftukha Assyayuti. 2023. "Telaah Konsep Pemilu Berkala dalam Sistem Pemilu di Indonesia". *Literasi Hukum*. Program Magister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mexasai Indra, et.all. 2023. "*Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia*". *Jurnal Konstitusi*. Vol.20, Issue 2.
- Mochammad Iqbal Imaduddin, et.all. 2025. "Penemuan Hukum dan Penafsiran Hukum". *Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan*. Vol.6, No.1.

- Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, Wahyu Priyanka Nata Permana. 2024. "Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden". *Lex Renaissance*. Vol.9, No.1.
- Nor Fadillah. 2022. "Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 9 1/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja". *Lex Renaissance*.
- Puji Purnama Sari, Syafa'at Anugrah Pradana, Abdul Hafid. 2024. "Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Antara Indonesia dan Brazil". *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*. Vol.3, No.1.
- Rangga Hotman Hasibuan. 2023. "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan *Conseil Constitutionnel* Republik Perancis: Sebuah Perbandingan". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*.
- Rustam, Tat Marlina, Duwi Handoko. 2022. "Sejarah Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Dimensi*. Vol.11, No.2.
- Tanto Lailam. 2014. "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar". *Jurnal Media Hukum*. Vol.21, No.1.
- Wendy Melfa, Idham. 2025. "Penyelenggaraan Pemilu Lokal Serentak sebagai Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Lebih Baik". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.10. No.1.
- Yez Gabriel Nelwan, Josepus Julie Pinori, Harly Stanly Muaja. 2025. "Kekuatan Hukum Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang (Uji Materiil UU Pemilu Mengenai Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden Putusan MK: 90/PUU-XXII/2023)". *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. Vol.15, No.1.
- Yukey Anggraini, *et.all*. 2025. "Mekanisme Efisiensi Pemilu dan Pilkada Serentak serta Melirik Perbedaan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam Mewujudkan Stabilitas Pemerintahan". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol.16, No.1.
- Yulvia Chandra Cipta, Rosita Indrayati, Intan Permata Putri. 2023. "Perbandingan Sistem Pemilihan untuk Indonesia yang Majemuk (Komparasi dengan Sistem Chile dan Amerika Serikat). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol.53, No.2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

International Covenant on Civil and Political Rights 1966, Article 25.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi MKRI.

Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 tahun 2005 Pasal 1 ayat (1).

Pertimbangan hukum lainnya dapat dibaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Pertimbangan Hukum lainnya dapat dilihat pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitsui Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Terjemahan *Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2017, Title IV, Chapter I Section I Art 44.*

Terjemahan *Korea (Republic of's) Constitution of 1948 with Amendments ehrough 1987. Chapter III Article 40.*

Terjemahan *Philippines's Constitution of 1987. Article VII Section 1.*

Terjemahan *United States of America's Constitution of 1789 with Amendments through 1992. Article I Section 1.*

Terjemahan, *Argentina's Constitution of 1853. Reinstated in 1983. with Amendments through 1994. Part 1, Chapter I Article 1.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 7.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 3 ayat (1).

INTERNET

Efraim Jordi Kastanya. "Mengenal Penafsiran Konstitusi dan Contohnya". Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penafsiran-konstitusi-lt63036436952ae/>. dikunjungi Tanggal 7 Januari 2026.

Fajar Laksono Suroso. "Penafsiran Konstitusi". pusdik.mkri.id. 2020. <https://share.google/uZPz3tZOewMukz0Ha>. dikunjungi Tanggal 5 Desember 2025.

Hukum Online, "Begini Alasan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah", <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mk-pisahkan-pemilu-nasional-dan-pemilu-daerah>, dikunjungi Tanggal 19 Agustus 2025 Pukul 15.30 WIB.

Jimmy Z. Usfunan. 2021. "Penafsiran Konstitusi", Fakultas Hukum Universitas Udayana, Slide Powerpoint, <https://share.google/01CckyTbSRh6CHhd>.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia-DF, Republik Federasi Brazil, Kementerian Luar Negeri.go.id, Brasilia <https://share.google/TcWddILB6HggUME0h>, dikunjungi 14 Januari 2026.

Komisi Pemilihan Umum. <https://www.kpu.go.id/page/read/1127/makna-pemilu-serentak>. dikunjungi 16 Agustus 2025 Pukul 21.32 WIB.

M. Ilham Hermawan. "Penafsiran Konstitusi: Originalism dan Ketidaktahuan yang disengaja". hukumonline.com. 2018. <https://share.google/eUL73RChCmTKKO3I2>. dikunjungi tanggal 4 Desember 2025.

Mochammad Afifuddin. *Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal: Menata Ulang Demokrasi Elektoral Indonesia*. Webinar Konstitusi. Tanggal 17 Juli 2025.

Pan Mohamad Faiz. 2020. "Membedah *Originalism*". <https://share.google/aRAmhgHKKdGtqQ4mc>. dikunjungi Tanggal 5 Desember 2025.

Rahadyan Fajar Harris. "Metode-Metode Penafsiran Konstitusi di Indonesia". heylaw.id. <https://heylaw.id/blog/metode-metode-penafsiran-konstitusi-di-indonesia>. dikunjungi Tanggal 7 Januari 2026.

RAMA Universitas Malikussaleh. <https://share.google/PlvugaSII06LQle2T>. dikunjungi 10 Desember 2025.

Terjemahan *Sciencis Po*. “*Argentine Political Regime Electoral*”.
<https://www.sciencespo.fr>, dikunjungi 15 Januari 2026.

Wikipedia, “*Living Constitution*”, <https://share.google/yE3I8RhA8Rtft2PQK>,
en.wikipedia.org, dikunjungi Tanggal 8 Februari 2026 Pukul 21.15.

Wikipedia. “Penghitungan Suara di Filipina”.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vote_counting_in_the_Philippines, dikunjungi
14 Januari 2026.

Zuhad Aji Firmantoro. “Dilema Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-putusan-mk-135-2024-lt6877dad13409d/>, dikunjungi 18 Agustus 2025 Pukul 13.35 WIB.

